



**LEMBAGA SENSOR FILM**  
REPUBLIK INDONESIA



# RAPAT KOORDINASI LEMBAGA SENSOR FILM 2022

## Merdeka Berbudaya Untuk Pemajuan Peradaban Literasi Digital

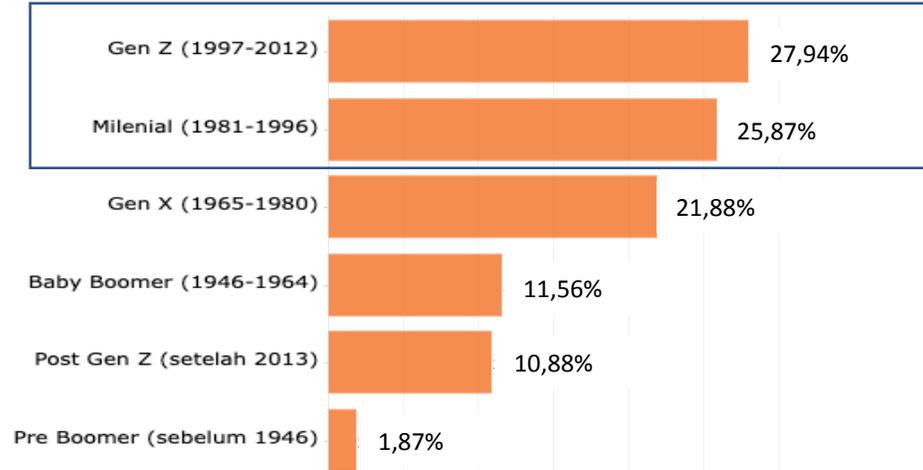
### **Pengaturan dan Pengawasan Konten di Era Digital**

---

Oleh: Neil R. Tobing  
Wakil Ketua I ATVSI  
Jakarta, 20 Agustus 2022

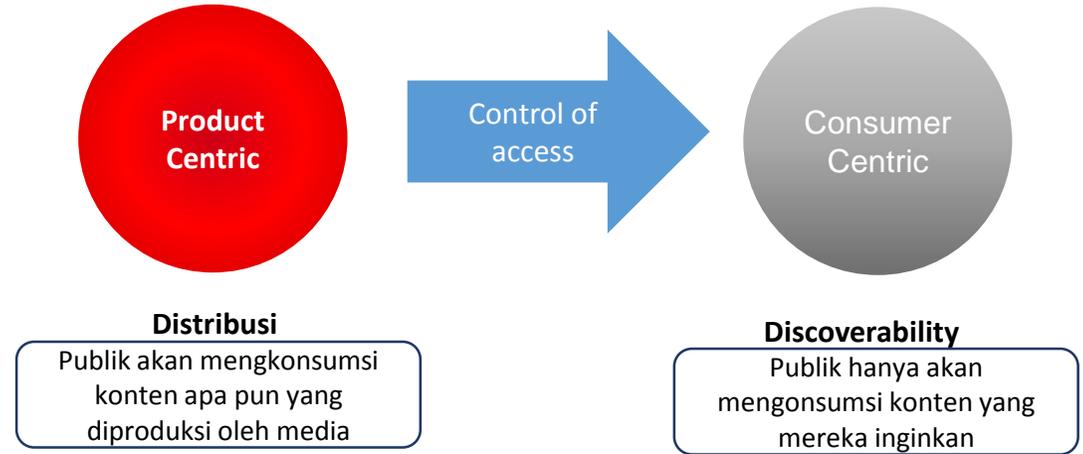
# Fenomena Perubahan Pola Konsumsi Media di Indonesia

## >50% Penduduk di Indonesia Didominasi Milenials dan Gen Z

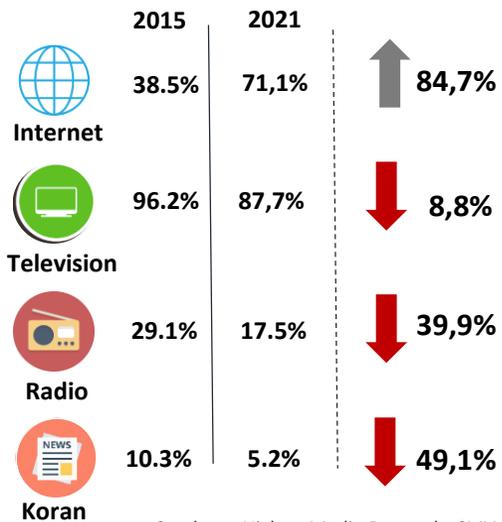


Sumber: Badan Statistik Indonesia 2021

## Pergeseran Fundamental dalam Industri Media



## Penetrasi Media 2015-2021



Sumber: : Nielsen Media Research, CMV 2015– 2021.

## Waktu Penggunaan Media per Hari

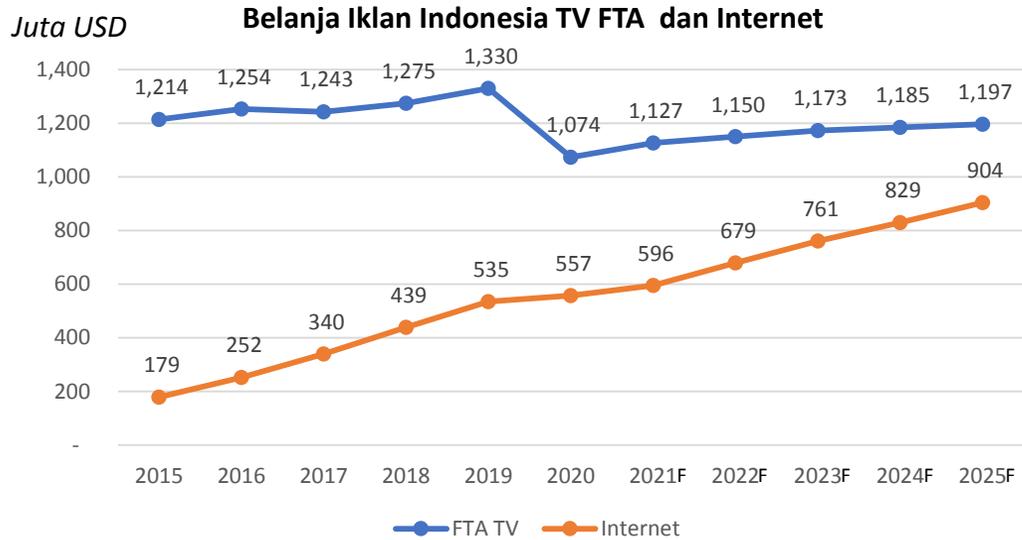


## Waktu Penggunaan Media Sosial & Video Streaming per Bulan

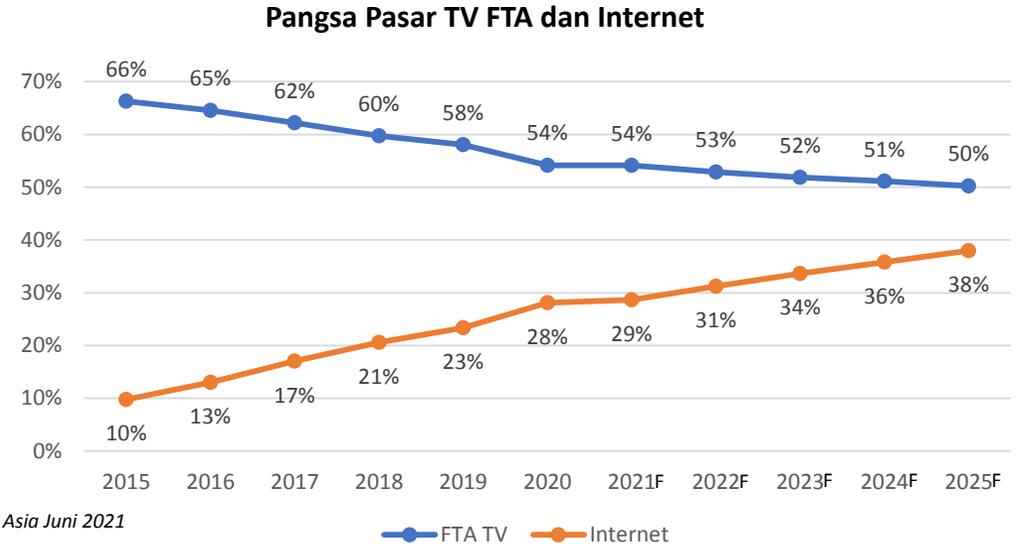


Sumber: Hootsuite (We are Social): Indonesian Digital Report 2022

# Disrupsi Digital dan Dampaknya terhadap Belanja Iklan Media

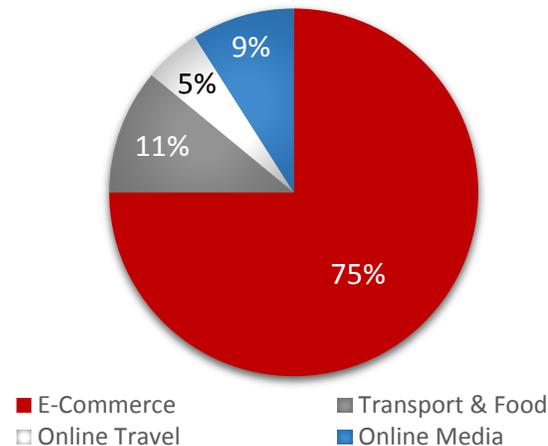


Sumber: Media Partner Asia Juni 2021



Sumber: Google Southeast Asia e-Economy Report 2021 (by Google, BAIN & Temasek)

### Kontribusi per sektor Ekonomi Digital (2021)



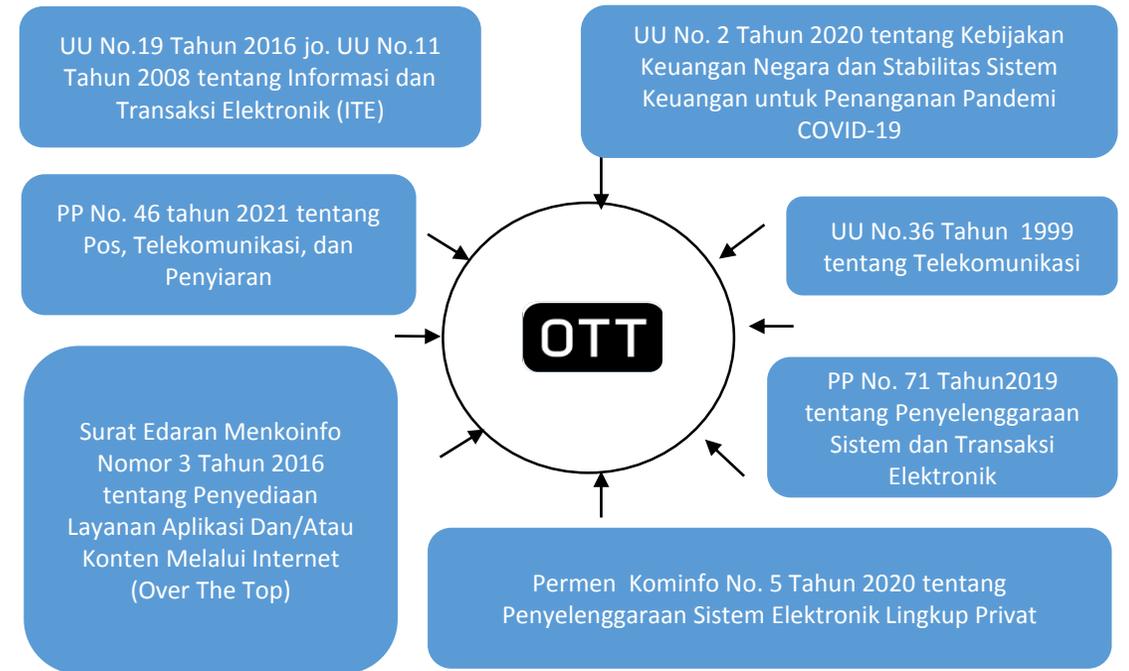
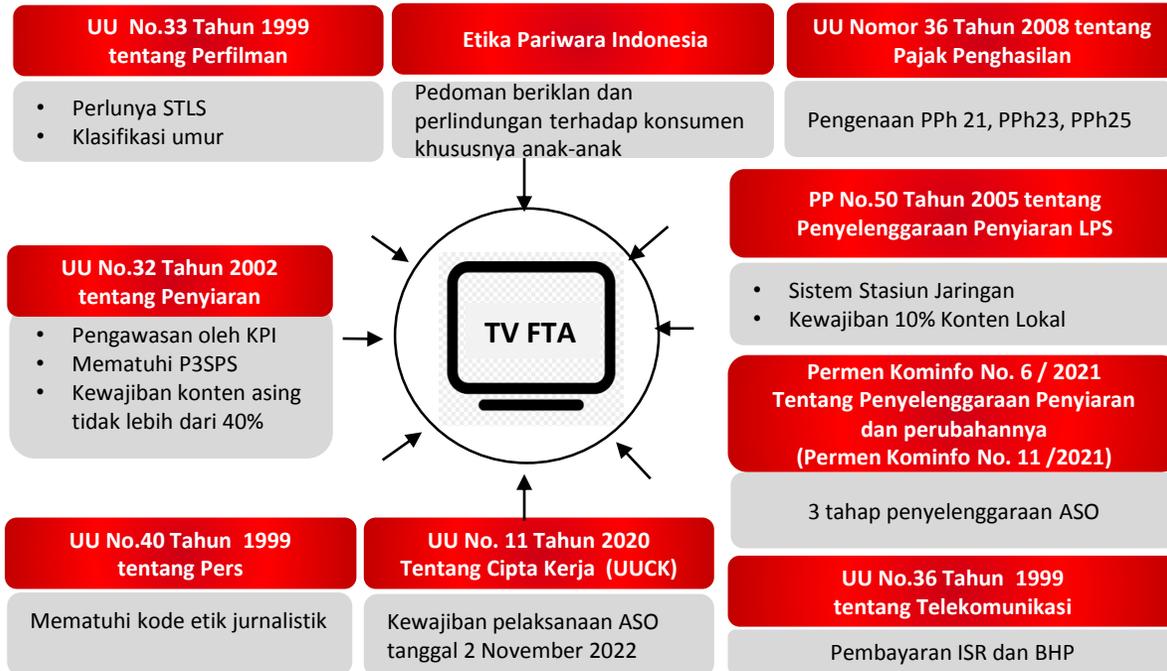
### Dominasi OTT Global



**70%** dari total belanja iklan digital di Indonesia diambil oleh raksasa global, khususnya *Google dan Facebook*, sedangkan media digital nasional memperoleh sisanya

Sumber: Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)

# Regulasi Penyiaran VS Regulasi OTT di Indonesia



## Unfair Advantages Platform Global



Tidak memiliki badan pengawas khusus



Tidak memerlukan ijin operasional khusus



Tidak tunduk pada regulasi terkait konten (P3SPS, Sensor, Komposisi Asing dan Lokal)



Tidak maksimalnya kontribusi kepada negara (Pph, ISR, BHP)



Masih sulitnya pemerintah untuk menarik pajak dari OTT Global besar seperti Meta, Alphabet, Amazon, Apple, Alibaba, Tencent

# Regulasi Platform Global di Berbagai Negara



## SENSOR & FILTERING



Regulasi OTT Singapura melalui Lembaga *Overseas Vendor Registration* (OVR) mewajibkan pendaftaran dan lisensi konten OTT di bawah UU Penyiaran Singapura untuk mencegah peredaran konten yang bertentangan dengan kepentingan, ketertiban umum, kerukunan nasional, atau menyinggung kesusilaan.



Di Australia, konten (termasuk OTT) diatur dalam Broadcasting Service Act 1992. ACMA menjadi otoritas tunggal yang meregulasi penyiaran, konten OTT, dan telekomunikasi.



Turki mengatur OTT di bawah UU Penyiaran Turki dan diawasi langsung oleh badan Radio and Television Supreme Board (RTUK)



## KONTEN LOKAL

Sejumlah negara meregulasi konten lokal dalam layanan OTT melalui tiga upaya:

- 1) Argentina, Meksiko, dan Uni Eropa menetapkan syarat minimum kuota konten lokal



10%



30%



30%

- 2) Austria, Kanada, Inggris, dan Denmark mewajibkan OTT mensubsidi produksi konten lokal
- 3) Argentina dan India mewajibkan produksi konten melibatkan sumber daya lokal dan/atau menggunakan bahasa lokal



## KOMPETISI YANG ADIL & HAKI



Australia mengesahkan News Media Bargaining Code yang memaksa raksasa teknologi wajib menegosiasikan pembayaran dengan penerbit & penyiar lokal atas konten yang disertakan dalam hasil pencarian atau umpan berita.



Badan Pengawas Persaingan Usaha Prancis memerintahkan Google dan Facebook untuk bernegosiasi dengan penerbit dan layanan berita Prancis mengenai biaya lisensi yang harus dibayar untuk konten pers.



## PAJAK



### Diverted Profits Tax (DPT)

Pajak ini hanya dikenakan jika perusahaan OTT diketahui membuat BUT di negara lain yang tarif PPh-nya di bawah 80% dari tarif PPh badan Inggris.



### Multinational Anti-Avoidance Law (MAAL) dan DPT

Berdasarkan ketentuan MAAL, setiap perusahaan multinasional yang ditemukan menghindari pajak Australia harus membayar kembali pajak terutang (ditambah bunga) dan denda hingga 100% dari pajak terutang. Pada 1 Juli 2017, Australia juga memberlakukan DPT untuk melawan skema pengalihan laba lainnya.

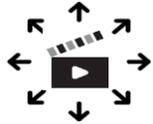


### Equalization Levy

Otoritas pajak India, Central Board of Direct Taxes (CBDT) mengeluarkan Equalisation Levy Rule pada tahun 2016 yang menerapkan tarif 6% atas penerimaan pembayaran atau piutang untuk jasa-jasa tertentu.

# Upaya Sektor Media Penyiaran Menciptakan Equal Level of Playing Field

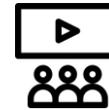
**Kesetaraan (*equal level of playing field*) harus terjadi di antara TV FTA dan platform global, karena sesungguhnya keduanya memiliki kesamaan, yaitu:**



*Core business* memproduksi dan/atau mendistribusikan konten melalui media/platform kepada viewers.



Platform global telah bertransformasi dari sekadar penyedia platform menjadi perusahaan media dan *shifting* untuk mendapatkan sumber revenue utama dari belanja iklan.



Memperebutkan viewers yang sama



Sama-sama beroperasi di ruang publik



Memiliki pengaruh yang besar kepada masyarakat



## Alternatif Regulasi & Pengawasan Konten di Era Digital

1

Melakukan revisi fundamental terhadap UU 32/2002 tentang Penyiaran, baik dari sisi pengaturan operasional OTT maupun pemberian kewenangan kepada KPI sebagai lembaga independen untuk mengatur dan mengawasi konten OTT. Negara yang menganut konsep ini adalah Turki dan Kanada.

2

Regulasi konten digital tersebar di beberapa Undang-Undang.

3

UU ITE memberikan kewenangan kepada KPI untuk mengawasi konten digital.